



RENCANA KERJA TAHUN 2017

**DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Jakarta, Desember 2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2017 (Renja Ditjen PPKL 2017). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, Rencana Strategis Ditjen. PPKL Tahun 2015–2019, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2017 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2017 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2017 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Ditjen PPKL Tahun 2017 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Ditjen PPKL.

Jakarta, Desember 2016
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

M.R. Karliansyah

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Mekanisme Penyusunan	3
C. Program Tahun 2016.....	3
D. Capaian IKU dan IKK Tahun 2016.....	3
E. Program Tahun 2015 – 2019	3
BAB II SASARAN STRATEGIS 2017.....	11
2.1. Sasaran Strategis Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	15
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017	32
3.1. Arah Kebijakan	33
3.2. Program Tahun 2017.....	36
3.3. Kegiatan Tahun 2017	37
3.4. Pembiayaan Tahun 2017	38
BAB IV PENUTUP	63
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2016 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 03/PPKL-Setdit/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2015-2019 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2017 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2017 merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan merupakan hasil kesepakatan Trilateral antara Kementerian LHK dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Renja ini menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2016 dihadapkan pada pencemaran air dan udara dari kegiatan industri, jasa, rumah tangga, transportasi serta kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan laut; potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan serta semakin meningkatnya dampak akibat fenomena perubahan iklim. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2017 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun anggaran 2016, arah kebijakan dan strategi Ditjen PPKL tahun 2017, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Tahun 2017 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan direktorat-direktorat yang ada di Ditjen PPKL. Masing-masing direktorat melakukan rapat kerja teknis untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

Pada Tahun 2017, terdapat perubahan cara kerja serta pendekatan pengalokasian anggaran pada Pemerintah, yang awalnya berbasis "*Money Follow Function*" menjadi "*Money Follow Program*". Perubahan ini berdampak pada perubahan target-target output di seluruh instansi Pemerintah termasuk di Ditjen. PPKL.

C. Program dan Capaian Tahun 2016

Sasaran prioritas nasional Tahun 2010-2014 adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terjaganya kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator sasaran prioritas yang menjadi dasar evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah:

1. Menurunnya tingkat pencemaran,
2. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan,
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan data serta informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2015 dan 2016 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berfokus pada hasil kerja berupa tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Selain itu, Ditjen. PPKL melakukan pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kerja dan tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Ditjen. PPKL melakukan pengelolaan kesatuan hidrologi gambut.

Indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari indikator-indikator kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pada Tabel 1 berikut ini. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Meningkatnya Kualitas Udara.	Indeks Kualitas Udara Meningkat	81.5	81,78
b.	Meningkatnya Kualitas Air.	Indeks Kualitas Air Meningkat	52.5	50,20
c.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan.	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	59.5	58,42
d.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut.	Kualitas Pesisir dan Laut Meningkat Setiap Tahun.	5% dan 12 Kawasan	6,67% dan 12 Kawasan pesisir
e.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Gambut.	Luas Lahan Gambut Terdegradasi yang Terpulihkan	150 Ha	2.870 Ha

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengendalian Pencemaran Udara (K1)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014			
		Beban emisi udara dari sektor industri turun dibanding basis data tahun 2014	7%	10%
		Pembangunan peralatan pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu di sejumlah 45 kota	3 Kota	3 Kota
		Jumlah kota yang menerapkan sistem green transportation	3 Kota	3 Kota
		Jumlah kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien (dari 45 kota yang dipantau)	9 Kota	27 Kota
Pengendalian Pencemaran Air (K2)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe).			

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu	2 DAS	4 DAS
		Jumlah sungai yang telah ditetapkan daya tampung beban pencemarannya	4 sungai	3 sungai
		Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD dan E-Coli)	6 sungai	2 sungai
		Beban pencemaran air turun 50 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	5%	5,25%
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015.			
		Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bali) meningkat setiap tahun	3 Kawasan pesisir (NCICD)	3 Kawasan pesisir (NCICD)
		Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, terumbu karang.	12 Kawasan	12 Kawasan
	Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	2 unit	1 unit
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)				
		Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 Provinsi	6 Provinsi
		Luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari	10%	11,3%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		basis data rata-rata tahun 2010 dan 2014		
Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir.			
		Kawasan yang ditetapkan peta satuan hidrologis gambutnya, dari 4 juta Ha luas indikatif KHG Babel, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumbar, Sumsel dan Sumut	3 KHG	8 KHG
		Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung	5 KHG	5 KHG
		Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	3 KHG	4 KHG
		Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat setiap tahun	150 Ha	2.870 Ha
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (K6)	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH			
		SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 71,00 (A) di tahun 2019	73	Belum di Evaluasi

Tabel 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

BAB II

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Tabel 7, sedangkan penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 7 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	
Misi Nasional	
<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	
Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019	Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered species</i>;3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Tabel 8 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”
Indikator Tujuan
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi
Sasaran Program
1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Tugas Ditjen PPKL
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Fungsi Ditjen PPKL
a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sasaran Kegiatan					
UDARA: Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	AIR: Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)	PESISIR LAUT: 1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah	GAMBUT Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	LAHAN AKSES TERBUKA Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	DUKUNGAN MANAJEMEN: Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019
Sasaran Unit Kegiatan					

UDARA:	AIR:	PESISIR LAUT:	GAMBUT:	LAHAN AKSES TERBUKA:	DUKUNGAN MANAJEMEN:
<p>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara;</p> <p>2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara;</p> <p>3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;</p> <p>4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;</p> <p>5. Meningkatkan Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.</p>	<p>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>2. Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>3. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>4. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p> <p>5. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air.</p>	<p>1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;</p> <p>2. Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015</p> <p>3. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I</p> <p>4. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II</p>	<p>1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut</p> <p>2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan</p> <p>3. Efektivitas pengendalian kerusakan gambut</p>	<p>1. Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan;</p> <p>2. Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama;</p> <p>3. Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan</p>	<p>1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dansasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;</p> <p>2. Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;</p> <p>3. Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan</p> <p>4. Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri</p>

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA			
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Udara</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Udara berada pada 81 - 84</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya penerapan green transportation</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah kota yang menerapkan green transportation meningkat dari tahun ke tahun</p> <p><u>Target</u> : 2 Kota</p>	<p>Makassar dan Manado</p>
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Udara</p>	<p>Tersedianya status mutu udara perkotaan</p>	<p>Pontianak, Banjarmasin, Pekanbaru, Padang</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
<p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p>	<p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Udara berada pada 81 - 84</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>INDIKATOR : jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi kontinyu (AQMS), yang beroperasi mudah, sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (passive sampler)</p> <p>TARGET : AQMS: 4 kota, Passive Sampler: 400 kab/kota</p>	<p>34 Provinsi - 400 Kab/Kota</p>
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Udara</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Udara berada pada 81 - 84</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi</p> <p>INDIKATOR : Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri</p> <p>TARGET : 188 Industri</p>	<p>350 Kab/Kota</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR			
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Air</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Air berada pada 52-55</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Ciliwung</p> <p><u>TARGET</u> : 2 IPAL Komunal dan sarana sanitasi dasar umum</p>	<p>Sungai Ciliwung</p>
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Air</p>	<p>Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah sistem yang dibangun untuk memantau kualitas air secara kontinyu pada 3 sungai di 3 DAS Prioritas</p>	<p>6 Titik kontinyu monitoring di 3 sungai (sungai Citarum 2 ttk, Kapuas 2 ttk, Sekampung 2 ttk) sistem entry akses data berbasis web</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
<u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0	<u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Air berada pada 52-55 <u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<u>TARGET</u> : 6 Titik kontinyu monitoring di 3 sungai (sungai Citarum 2, Kapuas 2, Sekampung 2) sistem entry akses data berbasis web	
Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat <u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0	Meningkatnya Kualitas Air <u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Air berada pada 52-55	Menetapkan alokasi beban pencemaran di 15 sungai di 15 DAS <u>INDIKATOR</u> : Ditetapkannya alokasi beban pencemaran di 4 sungai di 4 DAS Prioritas <u>TARGET</u> : 4 sungai	4 sungai
Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat <u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0	Meningkatnya Kualitas Air <u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Air berada pada 52-55	Meningkatnya kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran <u>INDIKATOR</u> : Terbangunnya 6 IPAL Domestik dan 6 IPAL USK di 6 sungai pada 6 DAS prioritas	Usaha Skala Kecil : way sekampung, citarum, kapuas

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
		TARGET : FS/DED IPAI USK di 3 DAS dan 2 Unit IPAL	
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Air</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Air berada pada 52-55</p>	<p>Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan Restorasi</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Kualitas air pada segmen sungai sepanjang 0.05 km yang melintas di permukiman meningkat</p> <p><u>TARGET</u> : 3 Sungai Dan 4 Unit IPAL</p>	Citarum, Ciliwung
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Air</p>	<p>Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah</p>	350 Kab/Kota

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
	<u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Air berada pada 52-55	<u>INDIKATOR</u> : Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER sebesar 75% dari 2000 industri yang dipantau	
<u>INDIKATOR</u> : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0	<u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<u>TARGET</u> : 600 industri	
DIREKTORAT PEMULIHAN LAHAN AKSES TERBUKA			
<p>Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada 59 - 62</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan</p> <p><u>TARGET</u> : 8 hektar</p>	<p>Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, Kab. Belitung Timur Prov. Babel</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	63 Kab/Kota
<p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 – 64,0</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><u>INDIKATOR</u>: Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada 59 - 62</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p><u>INDIKATOR</u> : Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai</p> <p><u>TARGET</u> : 18 Industri</p>	
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT			
<p>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<p>Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun 0 - 20%</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi</p>	<p>Wilayah I (1 kawasan) : Kab. Lampung Selatan - Provinsi. Bandar Lampung</p> <p>Wilayah II (1 kawasan) : Kab. Donggala, Kota Palu - Provinsi Sulteng</p> <p>Pesisir Maluku dan Maluku Utara</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
		pantai) <u>TARGET</u> : 2 kawasan prioritas	
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir	Wilayah I (1 unit) ::Ds Banyudono Kec Kaliori, Rembang- (Jateng) - cilacap, jepara Wilayah II (1 unit) :Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung - maluku

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
<p><u>INDIKATOR</u> : Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<p><u>INDIKATOR</u>: Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun 0 - 20%</p>	<p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk</p>	<p>Lokasi DED: Kendal, Cilacap, Sukabumi, Pontianak - jebara</p> <p>Pembangunan: Ds Banyudono Kec Kaliori, Rembang- (Jateng)</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<u>TARGET</u> : 2 unit IPAL dan 1 Unit Pemanfaatan Limbah Padat	Lokasi DED: Bitung, Makassar, Palu dan Gorontalo - bitung Pembangunan: Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Halmahera Selatan (Sudah ada DED) Ijin: Cilegon, Surabaya, Sumut, Indramayu, Aceh, Babel

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
<p>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<p>Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun 0 - 20%</p> <p>-</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Clean up di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak</p> <p><u>TARGET</u> : 2 lokasi</p>	<p>2 lokasi: Bintan (Prov. Kepri) dan Teluk Jakarta (Prov. DKI Jakarta)</p>
<p>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<p>Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun 0 - 20%</p>	<p>Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah kawasan pesisir yang dilakukan penentuan baseline pencemar, pemantauan berkala , dan pemetaan sumber pencemar</p>	<p>3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) - Teluk Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan Teluk Semarang</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
	<p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><u>TARGET</u> : 3 kawasan pesisir</p>	
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT			
<p>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut</p> <p><u>INDIKATOR</u>: Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun 50-500 Ha</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Terbangunnya sarana untuk pemulihan lahan gambut (sekat kanal) Terpulihkannya Ekosistem Gambut</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Jumlah sekat kanal yang dibangun di lahan gambut Luas ekosistem gambut yang terpulihkan</p> <p><u>TARGET</u> : 2.100 Ha</p>	<p>- Kab. Kutai Kertanegara</p> <p>- Kab. Naganraya</p> <p>- Kab. Kutai Timur - Kab. Tanah Tidung</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
<p>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut</p>	<p>Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya</p>	<p>- Kab. Nagan Raya- Kab. Mandailing Natal- Kab. Bengkalis- Kab. Indragiri Hilir- Kab. Kep. Meranti- Kab. Pelalawan- Kab. Rokan Hilir- Kab. Muaro Jambi- Kab. Sarolangun- Kab. Bangka Selatan- Kab. Banyuasin- Kab. OKI- Kab. Ketapang- Kab. Sambas- Kab. Pontianak- Kab. Kayong Utara- Kab. Sukamara- Kab. Barito Selatan- Kab. Katingan- Kab. Hulu Sungai Selatan- Kab. Malinau- Kab. Kutai Kartanegara</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
<p><u>INDIKATOR</u> : Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun</p>	<p><u>INDIKATOR</u>: Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun 50-500 Ha</p> <p><u>PROGRAM</u> : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p>	<p><u>INDIKATOR</u> : Proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER sebesar 50% dari 24 industri yang dinilai</p> <p><u>TARGET</u> : 40 Industri pada Ekosistem gambut</p>	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PPKL			
	<p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Nilai SAKIP Ditjen. PPKL Kementerian LHK memperoleh nilai 78 (kategori A) pada tahun 2019</p>	<p>Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH</p> <p><u>INDIKATOR</u> : SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019</p> <p><u>TARGET</u> : 75 Point</p>	<p>Jakarta</p>

SASARAN STRATEGIS 2017	SASARAN PROGRAM 2017	SASARAN KEGIATAN 2017 (OUTPUT)	LOKUS
	<p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Persentase layanan internal ditjen. PPKL Target : 100%</p>	<p>Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH</p> <p><u>INDIKATOR</u> : Layanan Internal Ditjen. PPKL <u>TARGET</u> : 12 Bulan</p>	<p>Jakarta</p>

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2017 arah kebijakan yang dilakukan Ditjen. PPKL kepada perbaikan lingkungan secara nyata di 15 DAS guna mendorong peningkatan IKLH dan ketahanan air, untuk : tutupan lahan, BOD-COD-Ecoli, udara. Posisi rencana kerja ini merupakan instrumen untuk menginternalisasi sasaran program yang telah tersusun dalam rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Ditjen. PPKL dalam melaksanakan programnya diantaranya :

- Memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara, lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM)
- memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan;
- mengembangkan dan mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- menyusun Inpres dan Road Map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

B. Program Tahun 2017

Secara indikatif, pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam tahun 2017 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA) KLHK yaitu sebesar Rp. **110.732.685.000,-**. Hal ini sudah melalui kesepakatan dengan Bappenas/Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan melalui forum Trilateral Meeting.

a. Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program Ditjen. PPKL

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan dan mendukung terhadap sasaran strategis Kementerian dalam Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ditjen. PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Dimana ketiga peran tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Teknis pada Ditjen. PPKL. Adapun target untuk Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program Ditjen. PPKL sebagai berikut :

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara Meningkat	82
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air Meningkat	53
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	60

b. Indikator Kinerja Kegiatan/Output Prioritas Direktorat Jenderal PPKL

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017, Ditjen. PPKL memutuskan untuk tetap menjadi 1 (satu) satuan kerja pusat yang menaungi 6 unit kerja eselon II terdiri dari 1 Unit Sekretariat dan 5 Unit teknis Direktorat. Hal ini dilakukan karena efisiensi alokasi pagu anggaran Ditjen. PPKL. Berikut ini merupakan besaran anggaran Ditjen. PPKL untuk setiap output dari kegiatan.

**PRIORITAS NASIONAL
DITJEN. PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PAGU
1	Kemaritiman dan Kelautan	Rp. 11.000.000.000,-
2	<u>Percepatan Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri Dan KEK</u>	Rp. 13.500.000.000,-
3	Pembangunan <u>Perumahan dan Permukiman</u>	Rp. 16.331.000.000,-
4	Pembangunan Kesehatan	Rp. 1.250.000.000,-
5	Pembangunan Desa Dan Perdesaan	Rp. 15.000.000.000,-
6	Perkotaan	Rp. 15.000.000.000,-
7	Dukungan Manajemen	Rp. 8.631.174.000,-
TOTAL		Rp. 80.712.174.000

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Setditjen PPKL)

Tabel Rekapitulasi per Output Kegiatan Setditjen PPKL

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5457	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		38,651,685	100.00
5457.002	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	75 Poin	8,631,174	21.04
5457.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	30,020,511	78.96

2. Pengendalian Pencemaran Udara

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5458	Pengendalian Pencemaran Udara		17,500,000	100.00
5458.001	Meningkatnya penerapan green transportation	2 Kota	1,750,000	10.00
5458.002	Tersedianya Status mutu udara perkotaan	4 Kota	13,250,000	75.71
5458.003	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	188 Industri	2,500,000	14.29

Kegiatan Pengendalian pencemaran udara mendapatkan porsi anggaran sebesar RP. 17.500.000.000,-. Output yang paling besar alokasinya adalah 5458.002 yaitu jumlah alat sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara kontinyu untuk 4 kota sebesar Rp. 13.250.000.000,-. Hal ini dapat menunjukkan bahwa output tersebut merupakan output prioritas bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yang dapat mendukung terhadap bencana kebakaran asap yang tiap tahun banyak terjadi di beberapa lokasi di Indonesia.

3. Pengendalian Pencemaran Air

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5459	Pengendalian Pencemaran Air		25,581,000	100.00
5459.001	Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu	3 DAS	6,000,000	23.45
5459.002	Menetapkan alokasi beban pencemaran di 15 sungai di 15 DAS	4 DAS	1,000,000	3.91
5459.003	Meningkatnya kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran	3 DAS dan 2 Unit IPAL	3,000,000	11.73

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5459.004	Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan Restorasi	3 Sungai dan 4 Unit IPAL	6,331,000	24.75
5459.005	Meningkatnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung	2 Unit	1,250,000	4.89
5459.006	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah	600 Industri	8,000,000	31.27

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air terlihat mendapatkan porsi anggaran tertinggi direktorat teknis Ditjen. PPKL sebesar RP. 25,581,000,000,- . Output yang paling besar alokasinya adalah 5459.001 yaitu jumlah alat Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada DAS prioritas secara kontinyu untuk 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas sebesar Rp. 6,000,000,000,-. Hal ini dapat menunjukkan bahwa output tersebut merupakan output prioritas bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang dipersiapkan untuk melakukan pemantauan terhadap DAS-DAS prioritas di Indonesia.

4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5460	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		11,000,000	100.00
5460.001	Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut	2 Kawasan Prioritas	5,000,000	45.45
5460.002	Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir	2 Unit IPAL dan 1 Unit pemanfaat limbah padat	3,000,000	27.27
5460.003	Clean up di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak	2 Lokasi	2,000,000	18.18

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5460.004	Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir	3 Kawasan NCICD	1,000,000	9.09

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mendapatkan porsi anggaran sebesar RP. 11.000.000.000,-. Output yang paling besar alokasinya adalah 5460.001 yaitu Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Hal ini dapat menunjukkan bahwa output tersebut merupakan output prioritas bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada tahun 2017 dimana berfokus pada pemulihan 85 kawasan pesisir prioritas. Pada Tahun 2016 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut berfokus pada Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 2 unit, sehingga pada tahun anggaran 2017, prioritas alokasi anggaran untuk output 5460.002 dapat dikurangi dan dialihkan kepada output yang lain yakni output pemulihan.

5. Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5461	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		9,000,000	100.00
5461.001	Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	8 Hektar	8,000,000	88.89
5461.002	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	18 Industri	1,000,000	11.11

Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mendapatkan porsi anggaran sebesar RP. 9.000.000.000,-. Output yang paling besar alokasinya adalah 5461.001 yaitu Meningkatkan luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Hal ini

dapat menunjukkan bahwa output tersebut merupakan output prioritas bagi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka pada tahun 2017 dimana berfokus pada melakukan fasilitasi pemulihan lahan terlantas bekas pertambangan.

6. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut

KODE	OUTPUT	VOLUME	JUMLAH (x1000)	%
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		9,000,000	100.00
5462.001	Terpulihkannya Ekosistem Gambut	2.100 Hektar	7,000,000	77.78
5462.002	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	40 Industri	2,000,000	22.22

Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut mendapatkan porsi anggaran sebesar RP. 9.000.000.000,-. Output yang paling besar alokasinya adalah 5462.001 yaitu terpulihkannya Ekosistem Gambut sebesar Rp. 7.000.000.000,-. Hal ini dapat menunjukkan bahwa output tersebut merupakan output prioritas bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut pada tahun 2017 dimana berfokus pada melakukan pemulihan lahan gambut yang rusak sebesar 2.100 Ha. Output ini menjadi prioritas untuk membantu pemulihan lahan gambut bencana kebakaran hutan pada tahun 2015-2019 di beberapa wilayah di Indonesia.

C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2017

Dalam melaksanakan programnya, Ditjen. PPKL mempunyai beberapa kegiatan diantaranya :

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
029.13.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		110,732,685,000
5457	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup		38,651,685,000
5457.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	75 Layanan	8,631,174,000
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan		3,244,978,000
052	Penyusunan Rencana Anggaran		483,326,000
053	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		658,628,000
054	Pengelolaan Data dan Informasi		341,372,000
055	Pengelolaan Keuangan		746,700,000
057	Pelayanan Hukum		750,000,000
058	Pengelolaan Kepegawaian		902,870,000
059	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		433,960,000
060	Pelayanan Rumah Tangga		319,340,000
063	Pengelolaan Kerjasama Teknik		750,000,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5457.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	30,020,511,000
001	Gaji dan Tunjangan		26,205,085,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3,815,426,000
5458	Pengendalian Pencemaran Udara		17,500,000,000
5458.001	Meningkatnya penerapan green transportation	2 Kota	1,750,000,000
5458.001.001	Green Transportation		1,750,000,000
051	Perencanaan dan Inventarisasi Penerapan GT		380,751,000
052	Pelaksanaan dan Evaluasi Green Transportation		1,369,249,000
5458.002	Tersedianya Status mutu udara perkotaan	404 Kota	13,250,000,000
5458.002.001	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis		9,718,729,000
051	Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Udara Ambien		308,550,000
052	Pembangunan Jaringan Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis		9,129,315,000
053	Perawatan AQMS yang sudah beroperasi		280,864,000
5458.002.002	Pemantauan Kualitas Udara Ambien - Manual Metode Passive Sampler		3,531,271,000
051	Pengumpulan dan pengolahan data		3,106,519,000
052	Evaluasi Kualitas Udara dan Tindak Lanjut Pengelolaan Kualitas Udara		424,752,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5458.003	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	188 Industri	2,500,000,000
5458.003.001	Meningkatnya kinerja industri yang memenuhi Baku Mutu Emisi		2,500,000,000
051	Evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara sektor industri		1,540,968,000
052	Penyusunan rencana peningkatan kinerja industri		959,032,000
5459	Pengendalian Pencemaran Air		25,581,000,000
5459.001	Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu	3 DAS	6,000,000,000
051	Penyusunan dokumen perencanaan penyediaan data dan analisis kualitas air		580,268,000
052	Pelaksanaan dan Monev penyediaan data dan analisis kualitas air		4,132,051,000
053	Perawatan Peralatan Onlimo Terpasang		480,000,000
054	Pengolahan Data dan Analisis Kualitas Air dari hasil pemantauan		807,681,000
5459.002	Menetapkan alokasi beban pencemaran di 15 sungai di 15 DAS	4 DAS	1,000,000,000
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penetapan alokasi beban pencemaran		95,600,000
052	Pelaksanaan dan Monev Penetapan alokasi beban penecamaran		904,400,000
5459.003	Meningkatnya kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran	3 DAS dan 2 Unit IPAL	3,000,000,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5459.003.001	Penurunan Beban Pencemaran Domestik		1,370,654,000
051	Perencanaan Penurunan Beban		310,890,000
052	Pelaksanaan dan Evaluasi Penurunan Beban Pencemaran		600,000,000
053	Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah		459,764,000
5459.003.002	Penurunan Beban Pencemaran Usaha Skala Kecil		1,629,346,000
051	Perencanaan Penurunan Beban		341,472,000
052	Pelaksanaan dan Evaluasi Penurunan Beban Pencemaran		261,416,000
053	Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah		1,026,458,000
5459.004	Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan Restorasi	3 Sungai dan 4 Unit IPAL	6,331,000,000
051	Perencanaan perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan restorasi		2,492,390,000
052	Pelaksanaan dan Monev perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan restorasi		3,838,610,000
5459.005	Meningkatnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung	2 Unit	1,250,000,000
051	Perencanaan Peningkatan Sarana Sanitasi Dasar Umum Dan IPAL Komunal di Sungai Citarum, Cisadane dan Ciliwung		218,670,000
052	Pelaksanaan dan Evaluasi Peningkatan Sarana Sanitasi Dasar Umum Dan IPAL Komunal di Sungai		1,031,330,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Citarum, Cisadane dan Ciliwung		
5459.006	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah	600 Industri	8,000,000,000
051	Penyusunan rencana peningkatan kinerja industri		5,500,000,000
052	Evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara sektor industri		2,500,000,000
5460	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		11,000,000,000
5460.001	Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut	2 Kawasan Prioritas	5,000,000,000
051	Penyusunan Perencanaan dan Monev Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Kawasan Prioritas		300,000,000
052	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		1,300,000,000
053	Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut		2,800,000,000
054	Inventarisasi Ekosistem Pesisir dan Status Mutu Laut		600,000,000
5460.002	Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir	2 Unit IPAL dan 1 Unit Pemanfaat Limbah Padat	3,000,000,000
051	Persiapan Pembangunan IPAL di Perkampungan Nelayan		1,100,000,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
052	Pembangunan dan Beroperasinya IPAL di Perkampungan Nelayan		1,900,000,000
5460.003	Clean up di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak	2 Lokasi	2,000,000,000
051	Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pesisir dan Laut Akibat Tumpahan Minyak		100,000,000
052	Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Pesisir dan Laut Akibat Tumpahan Minyak		1,900,000,000
5460.004	Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir	3 Kawasan NCICD	1,000,000,000
051	Pemantauan air laut di 3 kawasan prioritas nasional		518,841,000
052	Penyusunan Status Mutu Laut		212,769,000
053	Pemantauan pengelolaan lingkungan di kawasan pelabuhan laut		268,390,000
5461	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		9,000,000,000
5461.001	Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	8 Hektar	8,000,000,000
5461.001.001	Pemulihan Lahan Bekas Tambang		8,000,000,000
051	Pelaksanaan pemulihan lahan bekas tambang rakyat		5,999,000,000
052	Pembentukan lembaga masyarakat pengelola lahan pasca pemulihan		360,000,000
053	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemulihan Tahun 2018		1,369,000,000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
054	Evaluasi Kinerja Pengelolaan Tutupan Lahan		272,000,000
5461.002	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	18 Industri	1,000,000,000
051	Penyusunan rencana peningkatan kinerja industri		287,860,000
052	Penilaian Kinerja Industri dalam Rehabilitasi pasca tambang		712,140,000
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		9,000,000,000
5462.001	Terpulihkannya Ekosistem Gambut	2100 Hektar	7,000,000,000
051	Survey dan Verifikasi Kesatuan Hidrologis Gambut		2,486,807,000
052	Perencanaan pemulihan KHG		654,253,000
053	Pelaksanaan pemulihan KHG		3,858,940,000
5462.002	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	40 Industri	2,000,000,000
052	Evaluasi kinerja perusahaan dalam tata pengelolaan air		2,000,000,000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian melalui peran Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selain itu, dokumen renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2017 oleh seluruh unit kerja yang ada di Ditjen. PPKL. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Ditjen. PPKL dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen LAKIP.

LAMPIRAN

KEGIATAN DITJEN. PPKL PER PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
1.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Meningkatnya kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai)	Wilayah I (1 kawasan) : Kab. Lampung Selatan - Provinsi. Bandar Lampung Wilayah II (1 kawasan) : Kota Palu - Provinsi Sulteng	2 kawasan prioritas	5.000	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Rehabilitasi Kawasan Pesisir
2.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Meningkatnya sarana instalasi pengolahan air limbah di perkampungan nelayan wilayah pesisir	Jumlah Pilot Project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk	Wilayah I (1 unit) : : Ds Banyudono Kec Kaliori, Rembang- (Jateng) Wilayah II (1 unit) : Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung	2 unit IPAL dan 1 Unit Pemanfaatan Limbah Padat	3.000	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
3.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Penyediaan Peta, Data Pencemaran dan Sumber Pencemar pada Kawasan Pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang dilakukan penentuan baseline pencemar, pemantauan berkala, dan pemetaan sumber pencemar	3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) - Teluk Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan Teluk Semarang	3 kawasan pesisir (prioritas NCICD : Jakarta, Telok Benoa dan Semarang)	1.000	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut
4.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	<i>Clean up</i> di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dilakukan clean up akibat tumpahan minyak	2 lokasi: Bintan (Prov. Kepri) dan Teluk Jakarta (Prov. DKI Jakarta)	2 Lokasi	2.000	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
5.	Pengendalian Pencemaran Air	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah	Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER sebesar 75% dari 2000 industri yang dipantau	34 Provinsi(NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau,Bangka Belitung, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara,	600 industri	8.000	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
				Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat				
6.	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	63 Kab/Kota	18 Industri	1.000	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau
7.	Pengendalian Kerusakan Gambut	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem	Proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem	- Kab. Nagan Raya - Kab. Mandailing Natal - Kab. Bengkalis - Kab. Indragiri Hilir	40 Industri	2.000	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
		gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER sebesar 50% dari 27 industri yang dinilai	<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Kep. Meranti - Kab. Pelalawan - Kab. Rokan Hilir - Kab. Muaro Jambi - Kab. Sarolangun - Kab. Bangka Selatan - Kab. Banyuasin - Kab. OKI - Kab. Ketapang - Kab. Sambas - Kab. Pontianak - Kab. Kayong Utara - Kab. Sukamara - Kab. Barito Selatan - Kab. Katingan - Kab. Hulusungai Selatan - Kab. Malinau - Kab. Kutai Kartanegara 				

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
8.	Pengendalian Pencemaran Udara	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri	34 Provinsi(NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau,Bangka Belitung, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara,	188 industri	2.500	Produktivitas dan Daya Saing Industri	Pengembangan Industri Hijau

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
				Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat				
9.	Pengendalian Pencemaran Air	Perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan Restorasi	Kualitas air pada segmen sungai sepanjang 0.05 km yang melintas di permukiman meningkat	DAS Asahan (Segmen Danau Toba), Sungai Citarum, Sungai Ciliwung	3 Sungai dan 4 Unit IPAL	6.331	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air
10.	Pengendalian pencemaran air	Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu	Jumlah sistem yang dibangun untuk memantau kualitas air secara kontinyu pada 3 sungai di 3 DAS Prioritas	6 Titik kontinyu monitoring di 3 sungai (sungai Citarum 2 ttk, Kapuas 2 ttk, Sekampung 2 ttk) sistem entry akses data berbasis web	6 Titik	6.000	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
11.	Pengendalian pencemaran air	Menetapkan alokasi beban pencemaran di 3 sungai di 3 DAS	Ditetapkannya alokasi beban pencemaran di 4 sungai di 4 DAS Prioritas	4 sungai (Asahan, way sekampung)	4 Sungai	1.000	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air
12.	Pengendalian pencemaran air	Meningkatnya kualitas air sungai dengan menurunkan beban pencemaran	Terbangunnya 6 IPAL Domestik dan 6 IPAL USK di 6 sungai pada 6 DAS prioritas	Domestik : way sekampung, citarum, kapuas Usaha Skala Kecil : way sekampung, citarum, kapuas	FS/DED USK di 3 DAS (sekampung, citarum, kapuas) dan 2 Unit IPAL	3.000	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Jaga Air
13.	Pengendalian Pencemaran Air	Meningkatnya sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Citarum, Cisadane dan Ciliwung	Jumlah sarana sanitasi dasar umum dan IPAL komunal di Sungai Ciliwung	Sungai Ciliwung	2 IPAL Komunal dan sarana sanitasi dasar umum	1.250	Penguatan promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Sehat"	Lingkungan Sehat
14.	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, Kab. Belitung Timur Prov.	8 hektar	8.000	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
				Babel				dampak bencana serta perubahan iklim
15.	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Terpulihkannya Ekosistem Gambut	Luas ekosistem gambut yang terpulihkan	Provinsi : Kab. Naganraya, Kab. Kutai Timur, Kab. Tanah Tidung	2100 hektar	7.000	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
16.	Pengendalian Pencemaran Udara	tersedianya status mutu udara perkotaan	jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien: yang beroperasi kontinyu (AQMS), yang beroperasi mudah,	AQMS: Pontianak, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Padang Passive Sampler: 400 kab/kota	AQMS: 4 kota, Passive Sampler: 400 kab/kota	13.250	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan Iklim dan Bencana	Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan

No	Program/Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi 2017 (Jt Rupiah)	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional
			sederhana, dan menjangkau 500 kab/kota (passive sampler)					
17	Pengendalian Pencemaran Udara	Meningkatnya penerapan green transportation	Jumlah kota yang menerapkan green transportation meningkat dari tahun ke tahun	Makassar dan Manado	2 kota	1.750	Mengembangkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Green Transportation
18.	Dukungan Manajemen Ditjen. PPKL	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai 78,00 (A) di tahun 2019	Ditjen. PPKL	Sakip = 75,00	8.632		